



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Heni Risnawati^{1*}, Sukma Wijayanti², Sri Retnoningsih³

¹²Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

*Email: henirisnawati@umkudus.ac.id

Doi : <https://doi.org/DOI.10.37339/e-bis.v6i1.838>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

Info Artikel

Diterima :
2022-03-12

Diperbaiki :
2022-04-20

Disetujui :
2022-04-20

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah dapat memahami pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, penggunaan teknologi informasi akuntansi, ketaatan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Metode penelitian memakai kuantitatif dengan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala desa dan aparatur desa di kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati berjumlah 15 Desa atau Kelurahan. Pengambilan Sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan kompetensi aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian secara simultan seluruh variabel penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, penggunaan teknologi informasi akuntansi, ketaatan pelaporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

The purpose of this study to understand the effect of the internal control system, village apparatus competence, use of accounting information technology, financial reporting compliance on village fund management accountability in Gunungwungkal sub-district, Pati Regency. The research method uses quantitative primary data by distributing questionnaires to village heads and villages officials in the Gunungwungkal sub-district, Pati Regency, totaling 15 villages or sub-districts. Sampling using purposive sampling technique. The analysis tool uses multiple linear regression. The results show that the competence of village officials and compliance with financial reporting have a significant effect on the accountability of village fund management. The internal control system and the use of accounting information technology have no effect on the accountability of village fund management. Simultaneously, all research variables have an effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Internal control system, competency of village apparatus, use of accounting information technology, compliance with financial reporting, and accountability of village fund management

1. PENDAHULUAN

Menurut UUD Tahun 1945 menjelaskan Desa merupakan sistem kebijakan Indonesia, menunjukkan hubungan antara Negara, Desa, dan warga. Wujud bangsa dapat ditunjukkan oleh tingkat keberagaman pedesaan dengan tradisi, adat istiadat maupun hukum. Akuntabilitas merupakan pengendalian aparatur kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan salah satunya yaitu Desa. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tingkat akuntabilitas dan transparansi di pemerintah desa masih rendah. Potensi kecurangan dapat dilihat dari aparat desa yang memanipulasi data, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menjadi tidak sesuai. Menurut UU no 6 Tahun 2014 mengenai Desa yaitu wadah antara rakyat berpemerintah dengan pemerintah lokal dimana integritas hukum yang memiliki pemisahan antara daerah yang berkuasa dalam mengelola maupun memperjuangkan pemerintah berlandaskan aspirasi rakyat, asal yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan desa dilakukan dalam mengurus pemerintahan secara mandiri dan pelaksanaan pembangunan yang bermaksud dapat memajukan kedamaian rakyat. Pengelolaan Dana Desa dapat dioptimalkan dalam beragam kekayaan alam yang dimiliki.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 menunjukkan pelaksanaan dana yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima ditetapkan bagi pembiayaan pemerintah, implementasi pembangunan, pengembangan masyarakat serta pemberdayaan publik. Penanganan Dana desa yaitu suatu proses yang dikelola untuk kumpulan warga negara didalamnya diantaranya *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) menggunakan kekuatan dalam memenuhi tujuannya (Dewi et al., 2021). Pemerintah memberikan dana desa yang besar digunakan dalam pengembangan desa dengan dikelola secara efektif. Di kecamatan gunungwungkal pada tahun 2019 jumlah Alokasi Dana Desa Rp 5.951.798.000 dan Dana Desa sebesar Rp 15.450.382.000 melihat hal tersebut camat Desa Gunungwungkal mencoba mengevaluasi implementasi alokasi dana desa dengan anggaran 2019 yang sesuai dengan petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Anggaran desa dipergunakan dalam pembangunan prasarana jalan karena dapat meningkatkan potensi wisata daerah setempat. Penggunaan anggaran desa diperlukan transparansi, pengendalian intern dan perangkat desa yang berpengalaman untuk mengelola finansial desa. Pelaksanaan dana desa diperlukan adanya dukungan masyarakat yang proaktif serta kesiapan sistem informasi sebagai faktor penentu kemajuan.

Keberhasilan tata kelola dana desa diwujudkan melalui tanggungjawab untuk mengendalikan semua pelaksanaan kegiatan. Tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana diatur melalui pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian intern menangani prosedur aktivitas Negara supaya sinkron dengan tujuan yang telah disetujui. Pengendalian Intern yang informasinya akurat dan dapat dipercaya dapat meliputi perencanaan organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi asset (Martini, 2019). Pentingnya akuntabilitas keuangan desa belum diketahui oleh masyarakat tentang penggunaan dana desa. Partisipasi dan pengawasan dari rakyat pada implementasi desa bertujuan dalam menciptakan desa mandiri dapat tercapai (Arfiansyah, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan akuntabilitas dana desa. Penelitian

dari Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021) menjelaskan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penggunaan teknologi informasi akuntansi dan kompetensi aparatur negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Hendaris & Romli, 2021) menjelaskan bahwa kinerja perangkat desa, pengendalian intern, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketaatan pelaporan keuangan penelitian dilakukan oleh Nasution, Rabbiah, Ade.N dan Amalia, Dewi (2021) ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Dari uraian diatas, maka peneliti membuat penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel independen Sistem Pegendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi, Ketaatan Pelaporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, apakah sudah efektif sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dan amanah dalam mengelola keuangan untuk kemajuan desanya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan kondisi manajemen tidak memotivasi tujuan individu tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* menjelaskan manajemen berperilaku untuk kepentingan dan keberhasilan lembaga. Kesuksesan dari lembaga bisa diperoleh melalui peningkatan pengelolaan manajemen serta kemampuan utama (Donaldson & Davis, 1991) dalam (Budiana et al., 2019)

Pada teori *stewardship* disini bertindak sebagai pelayanan publik yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Namun, lebih memberikan prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disebut juga dengna principal, menghindari konnflik kepentingan antara pelayanan dan pemimpin yang menjadi eksekutif organisasi. Kepercayaan publik yang berlandaskan prinsip bahwa pihak pelayanan memiliki tanggungjawab besar dalam mengelola alokasi sumber daya (Hardiningsih et al., 2020). Pada praktiknya di organisasi pemerintah desa dimana telah menjalankan tugasnya untuk itu memiliki tanggungjawab membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, jelas sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang tepat, handal dan bisa dimengerti (Budiana et al., 2019)

2.2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan tatacara yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah dalam memberikan kepastian yang layak antara hubungan perolehan keunggulan laporan keuangan, loyalitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Puspa & Prasetyo, 2020). Dalam Undang-Undang No 60 tahun 2008 menguraikan sistem pengendalian internal mengatur metode kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala serta semua pegawai agar tercapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal suatu negara di awasi oleh inspektorat. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meliputi asset dan kekayaan suatu perusahaan. Sistem pengendalian internal melindungi semua wujud aktivitas penyalahgunaan, informasi

akuntansi yang benar. Dalam penyusunan laporan keuangan sistem pengendalian mewujudkan tujuan perusahaan dengan efektivitas, efisiensi, ekonomis dan dapat mencapai keandalan (Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, 2018). Dalam perencanaan sistem pengendalian internal juga dapat menilai resiko perusahaan agar terwujudnya tujuan perusahaan (Karyadi, 2019). Penyusunan laporan keuangan yang andal dapat menumbuhkan kepercayaan dengan *stakeholder* (Alam et al., 2019).

Menurut penelitian (Rosyidi, 2018), (Yustika, 2019), (Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, 2018),(Widyatama et al., 2017),(Martini, 2019) mengartikan hasil penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal dipergunakan dalam organisasi misalnya organisasi aparatur desa atau organisasi sektor publik (Karyadi, 2019).

2.3. Kompetensi Aparatur Desa

Pemerintah daerah menunjukkan kompetensi aparatur desa terdiri dari keahlian, perbuatan dan ketrampilan yang berkaitan dengan ketentuan desentralisasi, afiliasi pemerintah pusat dengan daerah, tata kelola keuangan daerah dalam UU No 23 tahun 2014. Kompetensi aparatur desa dibentuk dengan beberapa tahapan yaitu tahap seleksi sampai tahap pelaksanaan tugas. Faktor yang paling terpenting untuk menjalankan suatu instansi atau perusahaan yaitu sumber daya manusia. Tahap seleksi dapat menentukan kompetensi aparatur desa yang lebih terampil dan profesional. Aparatur desa yang professional dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Keahlian yang dimiliki aparatur desa menentukan pencapaian kinerja di daerah tersebut. Dalam aspek kompetensi berupa sifat, sistem penilaian, sikap, pengetahuan dan keterampilan (Puspa & Prasetyo, 2020).

Penelitian dari Mada et al (2017) memberi bukti kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian membuktikan kompetensi aparatur desa berperan penting dalam kemajuan organisasinya. Tingginya kompetensi yang dimiliki, maka semakin dapat dipertanggungjawabkan tata kelola keuangannya. Kompetensi aparatur desa yang sinkron dengan keahlian memiliki kemampuan yang berkualitas bagi organisasi serta memberikan dampak yang baik.

2.4. Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi merupakan media serta infrastruktur dalam memperoleh data berupa software dan hardware. Komputer yaitu bagian yang dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan teknologi informasi. Dimana komputer mampu melakukan kegiatan input data, proses sampai data tersebut menunjukkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Sugiarti & Yudianto, 2017). Menurut (Yulianti et al., 2019) Aplikasi komputer memiliki kelebihan pada ketelitian dan akurasi hasil pengolahan data, sehingga dapat meminimalkan kesalahan. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat perkembangannya. Informasi dapat diakses melalui layanan internet. Penggunaan teknologi informasi menggunakan perangkat lunak seperti sistem akuntansi keuangan daerah. Didalam riset yang dilakukan (Santoso, 2016) menjelaskan penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas keuangan daerah.

2.5. Ketaatan Pelaporan Keuangan

UU No 71 pada 2010 menjelaskan peraturan akuntansi pemerintah. Menjelaskan pedoman aturan yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Menurut Yulianti et al.(2019) tujuan pokok dalam akuntansi pemerintah bertanggung jawab, manajerial, pengawasan.

Ketaatan dalam pelaporan keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban dalam menginformasikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh pengambil keputusan (Mustofa, 2012). Dalam sistem pelaporan diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja aparatur daerah sesuai dengan anggaran. Setiap entitas yang dilaporkan mempunyai kewajiban untuk dilaporkan sesuai dengan hasil yang dicapai. Hasil laporan keuangan harus secara sistematis, terstruktur.

Penelitian Agus Suma Arta & Rasmini (2019), Judarmita & Supadmi (2017), Arfiansyah (2020) menjelaskan sistem laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan laporan keuangan yang sesuai dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dana desa dan kinerja pelaporan keuangan menjadi akuntabel, taat dalam pelaporan keuangan selain itu mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam memajukan desa.

2.6. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Corporate governance dalam financial statement salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan (Santoso, 2016) kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban organisasi kepada pihak berkepentingan untuk dipertanggungjawabkan. Dalam UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2004 menerangkan tatakelola keuangan desa yaitu hak dan kewajiban dalam mempergunakan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dana desa didapat dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa dan desa berkewajiban mengelola keuangan desa Menurut (Lestari et al., 2014). Sistem keuangan yang akuntabilitas memberikan informasi yang kredibel, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 menjelaskan kerangka konseptual dengan tujuan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan tanggungjawab.

Tata kelola dana desa merupakan *planning, organizing, actuating, controlling* dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah (Puspa & Prasetyo, 2020). Asas pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, partisipan dan harus dengan disiplin sesuai anggaran. Peraturan yang diatur bahwa pimpinan desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada pimpinan kota yaitu Bupati atau Walikota dengan melalui kepala camat setiap akhir tahun yang meliputi laporan pelaksanaan APB desa dan Laporan realisasi kegiatan. Kegiatan pelaporan akan di ungkapkan kepada masyarakat melalui baik laporan realisasi APB desa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan belum terealisasi, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

3. METODE

Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan pada survei dengan kuesioner, kemudian akan dibagikan ke responden. Variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, kompetensi aparat desa, penggunaan teknologi informasi akuntansi serta ketaatan pelaporan keuangan. Variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis data pada penelitian kuantitatif, dimana mengumpulkan serta

mengolah data berupa angka untuk menjelaskan sesuai permasalahan penelitian. Hasil jawaban kuesioner yang disebarakan dilihat menggunakan uji validitas dan uji reliabel. Analisis data menggunakan bantuan program SPSS yaitu analisis regresi berganda. Analisis data meliputi pengujian normalitas, kemudian untuk uji hipotesis.

Populasi yang digunakan terdiri dari kepala desa dan aparatur desa di kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati adalah 15 Desa atau Kelurahan. Teknik sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini:

1. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Desa)
2. Masa bekerja minimal 1 tahun
3. Jenjang pendidikan minimal SMA Sederajat
4. Desa penerima dana Desa
5. Desa dengan Laporan Pertanggungjawaban

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Statistiktik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Rentang teoritis	Mean	Rentang aktual	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	86	7-35	21	26-35	30,70	2,567
Sistem pengendalian internal	86	10-50	30	37-50	43,83	3,207
Kompetensi aparatur desa	86	10-50	30	38-50	43,65	3,036
Penggunaan teknologi informasi akuntansi	86	5-20	12,5	15-20	17,56	1,484
Ketaatan pelaporan keuangan	86	5-40	22,5	30-40	35,15	2,707

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil statistic deskriptif N sebesar 86 dan *standard deviation* menunjukkan penyimpangan data. Membandingkan rentang teoritis dan rentang aktual, serta mean dari setiap variabel. Berikut penjelasan dari analisis statistik deskriptif penelitian ini:

- a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
 Pada tabel 4.1 menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai rentang teoritis 7-35 dengan mean 21. Untuk rentang aktual 26-35 dengan nilai mean sebesar 30,70 dan *standard deviation* sebesar 2,567. *Mean* sebesar 30,70 lebih besar dari rentang teoritis. Hal ini memberi jawaban kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak jauh berbeda.
- b. Sistem pengendalian internal (SPI) (X1)
 Sistem pengendalian internal memiliki rentang teoritis 10-50 dan mean 30. Pada rentang aktual 37-50 dengan nilai mean sebesar 43,83 dan *standard deviation* sebesar 3,207. Nilai mean sesungguhnya 43,83 yang lebih besar dari mean teoritis. Berarti hasil respon

pertanyaan kuesioner sistem pengendalian internal masing-masing memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda.

c. Kompetensi aparatur desa (X2)

Variabel kompetensi aparatur desa memiliki rentang teoritis 10 sampai 50 dan mean sebesar 30. Pada rentang aktual 38 sampai 50 dengan mean sebesar 43,65 dan *standard deviation* 3,036 lebih besar dari mean teoritis. Dapat diartikan bahwa jawaban pernyataan responden untuk variabel aparatur desa memiliki persepsi yang hampir sama.

d. Penggunaan teknologi informasi akuntansi (X3)

Dari tabel statistik deskriptif diatas untuk variabel penggunaan teknologi informasi akuntansi memiliki rentang teoritis 5 sampai 20 dengan rata-rata 12,5. Untuk rentang aktual 15 sampai 20 dengan mean sebesar 17,56 serta *standard deviation* sebesar 1,484 yang lebih dari nilai rata-rata teoritis. Dapat disimpulkan responden memiliki persepsi yang hampir sama mengenai penggunaan teknologi informasi akuntansi.

e. Ketaatan pelaporan keuangan(X4)

Variabel ketaatan pelaporan keuangan memiliki kisaran teoritis 5-40 dengan rata-rata 22,5. Pada rentang aktual 30 sampai 40 dengan mean sebesar 35,15 dan *standard deviation* yaitu 2,707 lebih tinggi dari rata-rata teoritis. Untuk itu, bisa diligat bahwa persepsi responden mengenai pernyataan ketaatan pelaporan keuangan rata-rata sama.

4.3.Uji Validitas dan Uji Reabilitas

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan mengukur pertanyaan kuesioner dalam penelitian, apakah memenuhi validitas atau tidak. Uji validitas melihat hubungan antara skor dari setiap pertanyaan dan total skor dari pertanyaan (Ghozali, Imam dan Ikhsan,2016). Adanya uji validitas akan memberi bukti kebenaran dan keakuratan data penelitian. Hasil uji validitas memiliki nilai r hitung >0.2120 yang artinya dapat dikatakan memiliki validitas.

4.3.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas bertujuan dalam pengukuran apakah hasil didapat konsisten atau kemampuan dalam memperoleh hasil yang hampir sama dari respon persepsi responden.

Tabel 4.2. Reabilitas

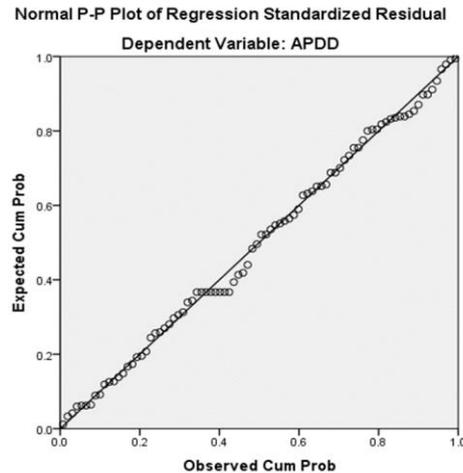
<i>Crobach's Alpha</i>	N item
.866	5

Tabel 4.2 memiliki nilai *Crobach's Alpha* sebesar 0.866 dari semua variabel pertanyaan dalam peneliiian dari minimal *crobach alpha* adalah 0,6. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa yang reliabel.

4.4.Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian dapat dilihat dari gambar grafik *normal plot* antara lain:

Gambar 4.1
Grafik Normal Plot



Gambar diatas menunjukkan titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal serta arah penyebarannya sesuai dengan arah garis diagonal. Dilihat dari bukti penelitian menunjukkan distribusi normal untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis, dapat disajikan sebagai berikut:

Uji Hipotesis

Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji Statistik t	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant	7.226	3.372		2.143	.035
Sistem Pengendalian Internal	.146	.118	.182	1.229	.223
Kompetensi Aparatur Desa	.261	.113	.309	2.310	.023
Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi	.341	.181	-.197	-1.883	.063
Ketaatan Pelaporan Keuangan	.332	.118	.350	3.823	.006
Uji Simultan (F)					
Nilai	15.673				
Sig	.000 ^b				
Uji Determinasi					
R Square	.436				
Adjusted R Square	.408				

Penjelasan tabel 4.3 mempunyai nilai determinasi 0.408. Hal itu peneitian mempunyai kontribusi hanya sebesar 40,8%. Untuk sisanya ada pengaruh dari variabel diluar penelitian ini. Sedangkan untuk uji F memberi bukti bahwa sebesar 0,000 dan angka angka tersebut lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ artinya secara bersama-sama variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama (H1) memberi bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Regresi berganda memiliki probabilitas $0.223 > 0,05$, oleh karena itu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Hipotesis pertama ditolak yang artinya sistem pengendalian internal pada masing-masing desa memiliki kelemahan yang harus diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu sistem pengendalian internal sangat penting untuk menunjukkan apakah sebuah desa memiliki akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif.

Penelitian yang memiliki hasil sama ditunjukkan oleh Dewi, Y.A., Nasfi dan Yuliza (2021). Hasilnya adalah sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa, sebab dalam Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Nagari telah melakukan pengendalian dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah tentang Desa, namun masih tidak dijalankan secara efektif. Selain itu Nafsiah, Nurhayati Siti (2020), Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah (2019). Hasil memberi bukti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua (H2) kompetensi aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Regresi berganda memiliki probabilitas $0.023 < 0,05$, maka variabel kompetensi aparatur Desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Hipotesis kedua Diterima, artinya bahwa kompetensi aparatur Desa sangat bagus, apabila kompetensi aparatur Desa tinggi atas meningkatkannya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang efektif. Kompetensi yang menghasilkan laporan keuangan desa sesuai dengan pedoman. Teori stewardship menjelaskan pemimpin sebagai pengelola mempunyai peranan dalam mengarahkan dalam mencapai tujuan organisasi, menunjukkan akuntabilitas dana desa sangat memerlukan keahlian pegawai yang bermutu.

Hasil penelitian sesuai dengan Mada Sarifudin, Kalangi L dan Gamaliel H (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Selaras dengan *riset* Budiana et al (2019), Pahlawan *et al* (2020). Hasil menunjukkan kompetensi aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Kompetensi aparatur desa yang tinggi akan memperlihatkan bahwa desa mempunyai akuntabilitas yang bagus. Aparatur desa yang mempunyai kompetensi berkualitas tentunya didukung dengan pendidikan, pelatihan berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga (H3) penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji regresi berganda memiliki probabilitas $0.063 > 0,05$, maka variabel penggunaan teknologi informasi akuntansi tidak

berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa atau hipotesis ketiga (H3) Ditolak. Artinya masih rendahnya kesadaran aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi yang pesat akan memudahkan pekerjaan perangkat desa, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perangkat desa. Hal ini dikarenakan kurang pemahaman mengenai penggunaan teknologi informasi akuntansi dengan baik akan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana yang tidak efektif.

Penelitian dari Karyadi, Muh (2018), memberikan bukti bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Penelitian juga sejalan dengan Pahlawan, Wijayanti, dan Suhendro (2020). Hasil penelitian membuktikan tidak berpengaruh, menunjukkan penyediaan fasilitas komputer yang ada tidak mendukung, sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Melihat hal itu, tentunya berpengaruh pada kinerja aparat desa untuk menghasilkan laporan keuangan desa secara akurat dan terbuka dapat menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keempat (H4) Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengujian regresi berganda memiliki probabilitas $0.006 < 0,05$ atau (H4) Diterima. Hasil *riset* menjelaskan ketaatan laporan keuangan pada masing-masing Desa sangat bagus, semakin tepat waktu dan akurat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntan Publik (SAP), hal tersebut menunjukkan aparatur desa memiliki integritas tinggi untuk melakukan laporan keuangan dana desa secara transparan. Apabila ketaatan pelaporan keuangan suatu desa bagus dapat meningkatkannya tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.

Konsisten dengan *riset* Munti dan Heru (2017), hasil menunjukkan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Sejalan dengan *riset* Fauzi achmad (2018). Hasil memberi bukti ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan Hal ini memberi bukti bahwa desa se-kecamatan Gunungwungkal Pati memiliki ketaatan yang bagus dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketepatan waktu pelaporan dan pedoman peraturan desa.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan untuk penelitian ini adalah dilihat dari hasil uji parsial memberikan buktinya sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa serta ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas dana desa. Hasilnya secara simultan memberi bukti bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, penggunaan teknologi informasi akuntansi dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implikasi yang diharapkan dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan organisasi dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperhatikan sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, penggunaan teknologi informasi akuntansi dan ketaatan pelaporan keuangan.

REFERENSI

- Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 709. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p26>
- Alam, M. M., Said, J., & Abd Aziz, M. A. (2019). Role of integrity system, internal control system and leadership practices on the accountability practices in the public sectors of Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955–976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). the Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report. *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(4), 569–580. <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784>
- Judarmita, I. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1719–1746. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p01>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33–46.

- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, M. P. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal*, 2(1), 1–12.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mustofa, A. I. (2012). *Accounting Analysis Journal Analisis Kebijakan Hutang*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 1(2).
- Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, D. P. (2018). The Role of Intellectual Capital To Economic Value Added (Empirical Study on Manufacturing Companies of Consumption Goods Sector). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University*, Pekanbaru, Indonesia, 1(1), 1–14.
- Santoso, eli budi. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Tesis, 85(1), 2071–2079.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang.

- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386–398.
- Yustika. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Kompetensi Perangkat Desa. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi*.